

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Aermadepa et al. *Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia (Tantangan Dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Budiarsih, Usman, and Slamet Suhartono. *Penanganan Pelanggaran Pemilu - Kajian Hukum Pidana Dan Administrasi*. Surabaya: Untag Press, 2021.
- Dini, Silvia Purnia, and Alawiyah Tuti. *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Haryanti, Dewi and Oksep Adhayanto. *Hukum Pemilu Dan Pilkada Langsung (Tinjauan Hukum Dan Teori)*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Husein, Harun. *Api Pemilu Menuju Smart Election*. Jakarta: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, 2015.
- Jukari, Ahmad et al. *Dinamika Hukum Pemilu (Problematika Dan Implementasi Produk Hukum KPU)*. Jakarta: Biro Advokasi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa, 2022.
- Junaidi, Veri et al. *Paralegal Penegakan Pukum Pemilu*. Jakarta: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2021.
- MacCormick, Neil, and Ota Weinberger. *An Institutional Theory Of Law (New Approaches to Legal)*. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1986.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen (Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Prabowo, Rian Adhivira et al. *Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu*. Jakarta: Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, 2022.
- Rahmadi. *Penghantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, and Hasil Pembahasan 1999-2002 Latar Belakang, Proses. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2010.

Trenggono, Nanang et al. *Dinamika Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Di Indonesia (Catatan Reflektif KPU Provinsi Se-Indonesia)*. Sleman: Asnalitera Yogyakarta Rt, 2018

Ulya, Zaky. *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*. Langsa: Universitas Samudra, 2017.

B. Jurnal

Agang, Mohammad Ilham. “Penegakan Hukum Pemilu Untuk Pemilu Berintegritas.” In *Dinamika Pemilihan Umum Dan Penyelenggara Negara Sebagai Implementasi UUD 1945*, 92–93. Tarakan: *Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara*, 2024.

Arif, Sugitanata, and Majid Abdul. “Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi.” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (1987): 1–21.

Dewa, Muhammad Jufri, Guasman Tatawu, La Sensus, Oheo Kaimuddin Haris, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, and Reschi Nur Rasak. “Implementasi Teori The New Separation of Power Dalam Sistem Kelembagaan Negara Di Indonesia.” *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024): 432–448.

Ence, Suharman, Satrio Adri, and Sofyan Herminarto. “Kajian Teori Dalam Penelitian.” *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan* 3, no. 1 (2020): 49–58.

Fahmi, Khairul. “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu System for The Crime of Election.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 265–283.

- Gabriela, Imanuella, and Angelique Longsam. "Analisis Yuridis Proses Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5 (2025): 1–37.
- Haryanti, Dewi. "Desain Hukum Rekrutmen Tim Seleksi Calon Anggota Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Keadilan Pemilihan Umum Serentak (Studi: Rekrutmen Tim Seleksi Calon Anggota KPU Dan Bawaslu Republik Indonesia)." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 2 (2021): 58-76.
- Hermawan, Tony. "Law Enforcement of General Election Crime as An Effort To Establish A Just Election," 2021.
- Jeprizal. "Penerapan Metode Unit Teaching Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Di Madrasah Tsanawiyah Lkmd Giti Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu." *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2014, 10–34.
- Kansil, Christine S T, Christian Samuel, Lodoë Haga, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, and Provinsi D K I Jakarta. "Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 880–888
- Leodita, Ashra, Anggun Prastika, and Puspaningrum. "Meningkatkan Integritas Pemilu : Mengevaluasi Peran Dan Tantangan Badan Pengawas Pemilu Di Boyolali , Indonesia." *Journal Of Contemporary Law Studies* 2, no. 3 (2024): 261–274.
- Manan, Abdul, and Ulyan Nasri. "Tantangan Dan Peluang Pendidikan Bahasa Arab : Perspektif Global." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 1 (2024): 256–265.
- Marliyah, Lili. "Hakekat Teori Dalam Riset Sosial." *Journal of Economic Education and Entrepreneurship* 2, no. 1 (2021): 30–37.
- Muhlisin, Luqman Hakim, and Rian Adhivira Prabowo. "Pertautan Yang Legal Dan Yang Etis: Pemaknaan Regulasi KPU Dan Bawaslu Dalam Putusan Dkpp." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 1 (2022): 121–141.

- Nisaul, Fatona, and Ngainnur Tohmah Siti. "Implementasi Asas-Asas Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Fiqih Siyasah." *Salarm: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 5 (2023): 1481–1492.
- Novriansyah, and Syaiful Ahmad Dinar. "Analisis Tugas Dan Kewenangan Aparat Penegak Hukum Di." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023): 132–139.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. "Tinjauan Pustaka Pemilihan Umum." *Journal Geej* 7, no. 2 (2020): 17–33.
- Purnomo, I Made Agus, Ruslan Haerani, and Abdul Gani Makhrup. "Peran Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kota Mataram." *Unizar Recht Journal (URJ)* 3, no. 4 (2024): 604–611.
- Raihan, Muhammad. "Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature Di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia." *Lex Renaissance* 10, no. November 2024 (2025): 65–93.
- Ramadani, Rizki. "Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020).
- Riewanto, Agus, and M. Zaki Zafran SR. "Reformulasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Guna Kepastian Hukum." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 33–60.
- Siregar, Nur Fitriyani. "Efektifitas Hukum." *Ejournal Iai Padang Lawas*, 2022, 1-16.
- Sudi, Prayinto. "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2019." *Electoral Research* 1, no. 1 (2019): 1–18.
- Taufiqurrahman, Siti Hasanah, and Firzhal Arzhi Jiwantara. "Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Negara Hukum Demokrasi (Studi Komparatif)." *Jatiswara* 38, no. 2 (2023): 241–54.
- Yuliawati, Nina. "Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Gakumdu Berdasarkan Undang-Undang." *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial* 3, no. 1 (2021): 71–89.

C. Skripsi

Abdullah. “Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Negara Hukum Demokratis.” Universitas Hasanuddin, 2023.

Alif, Zahran Amirullah. “Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Asn) (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr).” Universitas, 2020.

Allama, Nur Mubarak. “Konsep Pengembangan Akhlak Peserta Didik Menurut Pemikiran Az-Zarnuji Dan Transformasinya Di Madrasah Aliyah Putri Ali Maksum Krapyak Kulon Panggunharjo Sewon Bantul.” Universitas Islam Indonesia, 2019.

Alnoviano, Harjanto. “Rekonstruksi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.” Universitas Brawijaya, 2020.

Mangkau, Andi Satria Agung Putra. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Makassar (Law Enforcement of Criminal Acts of Legislative Elections in the City of Makassar).” Universitas Hasanuddin, 2023.

Mechtildis Olivia, “Pemanfaatan Instagram @Dkksemarang Sebagai Media Komunikasi Bencana Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Semarang (Maret - Desember 2020),” Doctoral Dissertation, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang. (Universitas Katolik Soegijapranata, 2022).

Nurlela. “Analisis Kemandirian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Dalam Sistem Konstitusi Indonesia.” Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024.

Nurul, Shabrina Nelda. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” Universitas Islam Riau, 2023.

Putra, Dian Malaya. “Kewenangan Bawaslu Dalam Penindakan Tindak Pidana Pemilu (Studi Kasus Di Kota Mataram).” Universitas Mataram, 2022.

Tammu, Lusin. “Analisis Hukum Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia.” Universitas Hasanuddin, 2023.

D. Prosiding

Wicaksono, Dian Agung, and Garuda Era Ruhpinesthi. "Ambiguitas Nomenklatur Kementerian, Lembaga Pemerintah, Dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Pada Kabinet Merah Putih." In Prosiding Simposium Nasional Hukum Aktual, 1–14. Jakarta: APHTN-HAN (Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara), 2024.

E. Majalah

Suberhani, Herwin. "Implementasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bengkulu." *Majalah Keadilan*. Bengkulu, 2021.

F. Internet

Bawaslu Republik Indonesia. "Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu & Pemilihan Tahun 2019-2024." Bawaslu, 2025. <https://pidiejaya.bawaslu.go.id/berita/hasil-penanganan-pelanggaran-pemilu-dan-pemilihan-tahun-2019-2024>. Diakses Pada 04 Januari 2026

Commission on Elections Republic Of The Philippines. *Batas Pambansa Blg. 881 (Omnibus Election Code of the Philippines)* (1985). <https://elibrary.judiciary.gov.ph/thebookshelf/showdocs/2/53271>. Diakses 31 Juli 2026

———. "Mandated Functions Commission on Elections." *Comelec.Gov.Ph*, 2016. https://www.comelec.gov.ph/?r=AboutCOMELEC%2FMandatedFunctions&utm_source=chatgpt.com.

DKPP RI. "Sejarah DKPP." *Dkpp.Go.,Id*, 2017. <https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/>. Diakses Pada 09 Juli 2026.

Hoesada, Jan. "Lembaga Negara Independen." *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*, 2016. <https://www.ksap.org/sap/lembaga-negara-indipenden/#:~:text=,Independent Regulatory Board and Commissions>. Diakses Pada 28 Februari 2026.

Hukumonline.com. "Topo Santoso Paparkan Pentingnya Hukum Pidana Dalam Proses Demokrasi." *Hukumonline.Com*, 2014. <https://www.hukumonline.com/berita/a/topo-santoso-paparkan-pentingnya-hukum-pidana-dalam-proses-demokrasi-lt545d53acce43e/>. Diakses Pada 10 Juni 2026

Huzaini, Dani Pratama. "Bawaslu Butuh Sarjana Hukum Untuk Perkuat Kinerja." Hukumonline.Com, 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/a/bawaslu-butuh-sarjana-hukum-untuk-perkuat-kinerja-lt5bbcc62452fbb/>. Diakses Pada 24 April 2026

Komnas Ham Republik Indonesia. "Pelindungan Untuk Jurnalis Dan Kebebasan Pers." Komnasham.Go.Id, 2022. <https://www.komnasham.go.id/pelindungan-untuk-jurnalis-dan-kebebasan-pers>. Diakses Pada 10 Juni 2026

Komisi Pemilihan Umum. "Sentra Gakkumdu: Garda Terdepan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Title." Kab-Yalimo.Kpu.Go.Id, 2025. https://kab-yalimo.kpu.go.id/blog/read/8545_sentra-gakkumdu-garda-terdepan-penegakan-hukum-tindak-pidana-pemilu. Diakses Pada 10 Juni 2026

KPU Kabupaten Mamberawo Tengah. "Gakkumdu: Dasar Hukum, Fungsi, Dan Contoh Kasus Penanganannya." Kab-Mamberamotengah.Kpu.Go.Id, 2025. https://kab-mamberamotengah.kpu.go.id/blog/read/8280_gakkumdu-dasar-hukum-fungsi-dan-contoh-kasus-penanganannya. Diakses Pada 10 Juni 2026

KPU Kabupaten Yahukimo. "Mengenal Gakkumdu: Sentra Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia." Kab-Yahukimo.Kpu.Go.Id, 2025. https://kab-yahukimo.kpu.go.id/blog/read/8569_mengenal-gakkumdu-sentra-penegakan-hukum-pemilu-di-indonesia. Diakses Pada 10 Juni 2026

Mahmodin, Mohammad Mahfud. "KPK Melemah Sejak Pengesahan Undang Undang No. 19 Tahun 2019?" Satoe Indonesia. Klaten: Satoe Indonesia, 2025. https://www.tiktok.com/@satoe.indonesia/video/7525003264820038968?is_from_webapp=1&sender_device=pc. Diakses Pada 10 Juni 2026

Nafiatul, Munawaroh. "9 Jenis Tindak Pidana Dalam Pemilu." Hukumonline.Com, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/9-jenis-tindak-pidana-pemilu-lt5bc40aaec6160/>. Diakses Pada 4 Januari 2026

Ombudsman Republik Indonesia, "LPNK," Ombudsman.Go.Id, 2026. https://ombudsman.go.id/linkdir/link_list?cat_id=5. Diakses Pada 03 Juli 2026

"Sentra Gakkumdu: Garda Terdepan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Title." Kab-Yalimo.Kpu.Go.Id, 2025. https://kab-yalimo.kpu.go.id/blog/read/8545_sentra-gakkumdu-garda-terdepan-penegakan-hukum-tindak-pidana-pemilu. Diakses Pada 12 Juni 2026

Tumpal, Ranap. “Beda Persepsi Gakkumdu, Dewi: Perlu Diskusi Mencari Solusi Kelemahan UU.” Bawaslu.Go.Id, 2019.
<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/beda-persepsi-gakkumdu-dewi-perlu-diskusi-mencari-solusi-kelemahan-uu>. Diakses Pada 22 Juni 2026

Wikipedia Ensiklopedia Bebas. “Lembaga Negara Nonkementerian.” Wikipedia.Org, 2026.
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemerintah_Nonkementerian.
 Diakses Pada 22 Mei 2026

G. Instrumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Komisi Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Wilayah Sungai.